

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara

Florensia Silaban ^{*1}
Yakobus Ndona ²

^{1,2} Universitas Negeri Medan

*e-mail : florensiasilaban@gmail.com ¹, yakobusndona@unimed.ac.id ²

Abstrak

Aktualisasi adalah bentuk kegiatan yang menghubungkan pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila berarti menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam norma ditemukan dalam norma hukum kenegaraan dan norma-norma moral, dan aktualisasinya terkait dengan perilaku semua warga negara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data yang beragam, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia serta menganalisis karakteristiknya daripada mengubahnya menjadi unit kuantitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena atau aspek tertentu dalam kehidupan orang-orang yang diamati. Masalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis masyarakat dan negara bukanlah hal yang sederhana. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mengindikasikan bahwa masih ada beberapa kesalahan mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai aspeknya. Tidak tepat untuk membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi "sakral" dan tabu, seakan-akan sudah pasti benar dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat konsep dan pengertian menjadi statis, kaku, dan tidak berkembang, serta berisiko ketinggalan zaman, meskipun beberapa prinsip dasar mungkin memang memiliki nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal perlu ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu diubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan diperjelas, dan beberapa mungkin perlu ditinggalkan. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaruan. Hakikat pembaruan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada, atau dengan kata lain, pembaruan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Adanya dinamika dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara merupakan suatu keharusan, agar Pancasila tetap relevan dalam memberikan arahan bagi pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan bersama bangsa dan negara. Ini bertujuan untuk menjaga tingkat loyalitas masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila, sambil juga mengurangi apatisme dan perlawanan terhadapnya. Inti dari dinamika dalam menerapkan nilai Pancasila dalam praktik kehidupan adalah adanya perubahan dan inovasi dalam mengubah nilai-nilai Pancasila menjadi norma dan tindakan hidup, sambil mempertahankan kesesuaian, relevansi, dan konteksnya.

Kata Kunci: nilai Pancasila, aktualisasi, berbangsa, bernegara

Abstract

Actualization is a form of activity that connects understanding of values and norms with actions carried out in daily life. Actualizing Pancasila means translating Pancasila values into norms and realizing them in everyday life. The description of Pancasila values into norms is found in state legal norms and moral norms, and their actualization is related to the behavior of all citizens and all aspects of state administration. The research method used by the author uses a qualitative approach with descriptive methods. According to Sugiyono (2007), qualitative research is research conducted on natural objects with the researcher as the main instrument, various data collection techniques, inductive data analysis, and research results that emphasize meaning rather than generalization. The aim of qualitative research is to preserve the form and content of human behavior and analyze its characteristics rather than converting it into quantitative units. The author uses descriptive methods in qualitative research to gain insight into certain phenomena or aspects in the lives of the people being observed. The problem of actualizing the basic values of the Pancasila ideology into the practical and societal life of the country is not a simple matter. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) indicates that there are still several fundamental errors in the way people understand and appreciate the Pancasila State in its various aspects. It is not appropriate to make various concepts and understandings "sacred" and taboo, as if they are definitely correct and perfect, so they cannot be questioned any more. Such an attitude makes concepts and understandings static, rigid and undeveloped, and risks being out of date, even though some basic principles may indeed have permanent and eternal value. The basic values of Pancasila have not been consistently actualized at the practical level and require continuous change, both in context and operational

terms. There are many things that need to be revisited and re-examined. Some may need to be changed, some may need to be further developed and clarified, and some may need to be abandoned. The actualization of Pancasila values is required to always undergo renewal. The essence of reform is improvement from within and through the existing system, or in other words, reform presupposes the existence of internal dynamics within Pancasila. The existence of dynamics in applying Pancasila values in social, national and state life is a necessity, so that Pancasila remains relevant in providing direction for decision making and solving problems in life with the nation and state. This aims to maintain the level of loyalty of society and citizens towards Pancasila, while also reducing apathy and resistance towards it. The essence of the dynamics in applying Pancasila values in life practice is change and innovation in transforming Pancasila values into living norms and actions, while maintaining their suitability, relevance and context.

Keyword: Pancasila value, actualization, nationship, citizenship

PENDAHULUAN

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari berbagai aspek: (1) kewajiban moral, (2) aspek subyektif, (3) kepatuhan moral, (4) kesadaran moral, (5) internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, (6) proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan (7) penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah kesepakatan politik para pendiri bangsa ketika Indonesia didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai penyimpangan dalam aktualisasi nilai-nilainya. Penyimpangan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna aslinya, yang sering kali diikuti oleh upaya untuk meluruskan kembali. Pancasila sering dianggap sebagai ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering digambarkan sebagai bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukanlah komunisme dan bukan pula kapitalisme, tidak menganut individualisme atau kolektivisme, dan bahkan bukan teokrasi maupun sekulerisme. Posisi Pancasila ini membuat penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara menjadi sulit. Dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum yang terus bergerak ke kanan dan ke kiri tanpa pernah berhenti tepat di tengah.

Pada saat berdirinya Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur kehidupan bernegara. Namun, sejak November 1945 hingga sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan menerapkan sistem demokrasi liberal, yang berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan dan menjadi pro-liberalisme. Penyimpangan ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengubah haluan politik negara. Pendulum yang berada di kanan digeser ke kiri, yang menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik kiri di Indonesia (seperti PKI). Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang anti-Barat (kapitalisme) dan pro-kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Pyongyang. Puncaknya adalah pemberontakan Gerakan 30 September 1965, yang memicu tumbangannya pemerintahan Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto). Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945, mengubah haluan politik dari kiri yang anti-Barat ke kanan. Namun, rezim Orde Baru akhirnya juga dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, cenderung ke arah praktik liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, gerakan reformasi yang dahsyat berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangannya rezim Orde Baru, muncul empat rezim Pemerintahan Reformasi hingga saat ini. Pemerintahan-pemerintahan Reformasi ini diharapkan mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data yang beragam, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia serta menganalisis karakteristiknya daripada mengubahnya menjadi unit kuantitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena atau aspek tertentu dalam kehidupan orang-orang yang diamati. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati pola perilaku masyarakat Indonesia terkait dengan Pancasila. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi analisis terkait penggunaan media. Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian ini, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai setting, sumber, dan metode. Berdasarkan pengaturan, data dapat dikumpulkan melalui setting alamiah, dengan teknik pengujian yang berbeda dan responden di pusat penelitian, seminar, diskusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena ingin memahami perspektif subjek penelitian dan lebih fokus pada penggambaran faktual dan objektif secara menyeluruh mengenai masalah, situasi, atau peristiwa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Aktualisasi Nilai Pancasila

Aktualisasi adalah bentuk kegiatan yang menghubungkan pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila berarti menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam norma ditemukan dalam norma hukum kenegaraan dan norma-norma moral, dan aktualisasinya terkait dengan perilaku semua warga negara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

Nilai Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia itu sendiri. Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

Nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia adalah sumber material nilai tersebut, hasil dari pemikiran kritis dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila merupakan filosofi atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang diyakini sebagai sumber nilai untuk kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai Pancasila mencakup tujuh nilai kerohanian: kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis, dan religius, yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia.

Menurut Darmodiharjo (1996), bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa berdasarkan nilai Pancasila, yang dijadikan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, serta merupakan sumber nilai dan hukum, sehingga Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa dan negara diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif.

1. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

Aktualisasi Pancasila secara objektif melibatkan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan, termasuk lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini juga mencakup bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, hukum (terutama dalam penerapan undang-undang), GBHN, pertahanan dan keamanan, pendidikan, serta bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah penerapannya oleh setiap individu, warga negara, penguasa, dan orang Indonesia dalam aspek moral yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktualisasi subjektif ini lebih penting daripada aktualisasi objektif karena keberhasilannya merupakan syarat utama untuk aktualisasi objektif. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif akan efektif jika ada keseimbangan spiritual yang menggabungkan kesadaran hukum dan moral, sehingga pelanggaran terhadap Pancasila tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral, yang lebih ditekankan pada sikap dan perilaku seseorang (Rismawati, 2017:39).

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus selalu diperbarui. Hakikat pembaruan adalah perbaikan dari dalam melalui sistem yang ada, mengindikasikan adanya dinamika internal dalam Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, dalam diri Pancasila sebagai realitas terdapat potensi, yaitu kemampuan untuk berubah. Potensi ini adalah kemampuan subjek (Pancasila) untuk berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N. Whitehead (1947), setiap satuan aktual (termasuk Pancasila) memiliki daya kemungkinan untuk berubah, bukan hanya

kemungkinan logis atau objektif. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses menjadi yang berkelanjutan. Dalam konteks aktualisasi nilai Pancasila, setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada semua tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila (Saidurrahman dan Arifinsyah, 2018).

Menurut Suwarno (Eddy, 2018:119), untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara, orang harus menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan sila ke-4 tentang negara, termasuk wilayah, warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, harus menganalisis pasal-pasal terkait sila ke-3 tentang bangsa Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, harus menganalisis pasal-pasal terkait sila ke-1, ke-2, dan ke-5 tentang kehidupan beragama, kemanusiaan, dan sosial-ekonomi.

Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila

Alfred North Whitehead (1864-1947), seorang tokoh utama filsafat proses, berpendapat bahwa semua realitas di alam mengalami proses atau perubahan yang mencakup kemajuan, kreativitas, dan pembaruan. Realitas itu dinamis dan selalu dalam proses "menjadi," meskipun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah ini dapat diterapkan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas (pengada). Masalahnya adalah, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? Unsur nilai Pancasila mana yang harus kita pertahankan tanpa perubahan?

Moerdiono (1995/1996) mengidentifikasi tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila:

1. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah nilai yang sangat abstrak dan tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran seperti aksioma. Dari segi kandungan nilainya, nilai dasar berkaitan dengan eksistensi sesuatu, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara dan tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan serta cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi mengenai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang bersifat kontekstual, merupakan penjabaran dari nilai dasar, yang menjadi panduan untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, tetapi tetap mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran ini bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang ditentukan oleh nilai dasar tersebut. Dari segi kandungannya, nilai instrumental mencakup kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

3. Nilai Praksis

Nilai praksis adalah nilai yang tercermin dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila.

Nilai praksis tercermin dalam berbagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan ekonomi, pemimpin masyarakat, dan individu warga negara. Dari segi kandungannya, nilai praksis merupakan arena pertarungan antara idealisme dan realitas. Pelaksanaan nilai yang dianut sangat menentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental. Bukan pada rumusan abstrak, kebijaksanaan, strategi, rencana, program, atau proyek terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, melainkan pada kualitas pelaksanaannya di lapangan.

Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebuah ideologi dapat memiliki rumusan yang sangat ideal dengan ulasan yang logis dan konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumental. Namun, jika nilai praksisnya tidak dapat diaktualisasikan, ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya.

Jika konsistensi antara ketiga nilai tersebut dapat ditegakkan, maka ideologi tersebut tidak akan menghadapi masalah. Masalah baru muncul jika terjadi inkonsistensi di antara ketiga tataran

nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila yang formal dan abstrak-umum-universal perlu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum-kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus-individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila harus menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individu, sehingga menjwai semua tingkah laku dalam praktik kenegaraan, politik, dan kehidupan pribadi.

Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai transformasi Pancasila formal dari kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) dan kategori operatif (berupa praktik hidup). Proses transformasi ini berjalan tanpa masalah selama tidak terjadi deviasi atau penyimpangan berupa pengurangan, penambahan, atau penggantian (dalam Suwarno, 1993: 110-111). Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilakukan secara kreatif dan dinamis, karena Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan.

Masalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis masyarakat dan negara bukanlah hal yang sederhana. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mengindikasikan bahwa masih ada beberapa kesalahan mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai aspeknya. Tidak tepat untuk membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi "sakral" dan tabu, seakan-akan sudah pasti benar dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat konsep dan pengertian menjadi statis, kaku, dan tidak berkembang, serta berisiko ketinggalan zaman, meskipun beberapa prinsip dasar mungkin memang memiliki nilai yang tetap dan abadi.

Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal perlu ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu diubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan diperjelas, dan beberapa mungkin perlu ditinggalkan. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaruan. Hakikat pembaruan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada, atau dengan kata lain, pembaruan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila.

Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa dalam diri Pancasila sebagai realitas (pengada) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi ini adalah kemampuan nyata subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek berubah dari dalam dirinya sendiri. Mirip dengan teori A.N. Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) mengandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, tetapi setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadian selanjutnya.

Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitannya dengan nilai dasar Pancasila. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi wilayah, warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang mencakup faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial-ekonomis (Suwarno, 1993: 126).

KESIMPULAN

Adanya dinamika dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara merupakan suatu keharusan, agar Pancasila tetap relevan dalam memberikan arahan bagi pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan bersama bangsa dan negara. Ini bertujuan untuk menjaga tingkat loyalitas masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila, sambil juga mengurangi apatisme dan perlawanan terhadapnya. Inti dari dinamika dalam menerapkan nilai Pancasila dalam praktik kehidupan adalah adanya perubahan dan inovasi dalam mengubah nilai-nilai Pancasila menjadi norma dan tindakan hidup, sambil mempertahankan kesesuaian, relevansi, dan konteksnya. Sementara itu, perubahan dan inovasi yang berkelanjutan terjadi ketika ada proses internal yang dinamis (self-renewal) dan

penerimaan terhadap nilai-nilai dari luar yang sesuai untuk memperkaya ideologi Pancasila. Hasil dari semua upaya perubahan dan inovasi dalam menerapkan nilai Pancasila adalah menjaga penerimaan dan kepercayaan masyarakat dan warga negara Indonesia terhadap Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Novaya, A. F. (n.d.). Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat. CIVICUS:Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, 1-5.
- Eddy, I. W. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. DharmaSmrti, 1-134.
- Tarwan, N. S. (n.d.). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. Moha Guru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 79-87.
- Sulistyanto. (n.d.). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. 53-62.
- Nurlaily, E. D. (2020), Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Di Kabupaten Banyumas.Fkip UMP, 11-48